



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9586-9592

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP No. 04 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Dania Salsabila, Palupi Widyatna Sari, Reza Quratus Salsabila, Nadia Azalia Putri
Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
daniassalsabila18@gmail.com, widiyatnapalupi@gmail.com, rezaquratus@gmail.com, nadiaazalia@uinkhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi langsung ke lokasi instansi, serta pengkajian dokumen resmi laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPP Kabupaten Banyuwangi telah menyajikan CaLK secara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi, identitas entitas pelaporan, penerapan basis akuntansi ganda-yaitu basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran serta basis akrual untuk Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas- serta penjelasan rinci terhadap seluruh pos-pos dalam laporan keuangan. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi belanja operasi mencapai 86,80 persen dari total anggaran sebesar Rp28,23 miliar, sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 98,11 persen dari anggaran Rp679,21 juta yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan sistem informasi administrasi kepegawaian atau SIASN. Meskipun telah memenuhi syarat formal, masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas substantif, terutama dalam hal kedalaman penjelasan mengenai kebijakan amortisasi aset tidak berwujud dan penyajian analisis tren kinerja keuangan secara berkelanjutan. Penyajian CaLK yang transparan dan bertanggung jawab ini berkontribusi secara signifikan dalam mendukung prinsip akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan sesuai dengan tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: Catatan Atas Laporan Keuangan, Psap No. 04, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Basis Akrual

1. Latar Belakang

Reformasi tata kelola keuangan publik telah menjadi agenda strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara global, penerapan standar akuntansi berbasis akrual menjadi tolok ukur internasional dalam mengukur kualitas pelaporan keuangan sektor publik karena mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi keuangan entitas pemerintahan secara utuh Christiaens et al., 2021. Di Indonesia, reformasi ini ditandai dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diwajibkan diterapkan secara penuh oleh seluruh entitas pemerintah daerah mulai tahun anggaran 2015. Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan kemajuan signifikan, di mana pada tahun 2023 sebanyak 93,4% pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkat drastis dari hanya sekitar 35% pada tahun 2015 (BPK RI, 2024). Meskipun demikian, kualitas substantif laporan keuangan khususnya kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih terus menjadi sorotan dalam evaluasi BPK maupun kajian akademis.

CaLK merupakan bagian integral laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam PSAP Nomor 04. CaLK berfungsi sebagai jembatan antara angka-angka dalam laporan keuangan dengan pengguna laporan, karena menyajikan informasi naratif, kebijakan akuntansi, rincian pos laporan keuangan, dan informasi lain yang

Analisis Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP No. 04 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

diperlukan untuk pemahaman yang memadai. Dalam konteks internasional, kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan publik terbukti berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan legislatif (Heald & Hodges, 2020).

Di Kabupaten Banyuwangi, upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan terus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp3,473 triliun, kompleksitas fiskal daerah ini menuntut sistem pelaporan keuangan yang akuntabel di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) (Sumarsono, 2024). BKPP merupakan OPD strategis yang mengelola pengembangan kompetensi dan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan anggaran belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp28,23 miliar dan belanja modal sebesar Rp679,21 juta yang diarahkan untuk digitalisasi administrasi kepegawaian melalui aplikasi SIASN.

Dalam praktik penyusunan CaLK, masih ditemukan sejumlah tantangan substantif, antara lain kesenjangan antara pemenuhan formal terhadap ketentuan PSAP dengan kedalaman pengungkapan yang disajikan, kompleksitas penerapan dual basis akuntansi basis kas pada LRA dan basis akrual pada LO, Neraca, serta LPE yang rentan menimbulkan kebingungan tanpa penjelasan memadai dalam CaLK, serta kebutuhan pengungkapan aset tidak berwujud yang tepat seiring meningkatnya investasi digital BKPP (Feryansyah et al., 2025). Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi berdampak langsung terhadap akuntabilitas publik dan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek penerapan SAP dan kualitas CaLK. Kapantow et al. (2023) menemukan bahwa penerapan CaLK berdasarkan PSAP No. 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah sesuai ketentuan, namun masih terdapat kelemahan dalam kedalaman pengungkapan kebijakan akuntansi. Prayogo, Fikri, dan Nandini (2023) mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan pengakuan beban dan pendapatan dalam implementasi SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah. Reu (2024) menemukan bahwa penyajian beban non-kas dan pengakuan aset tidak berwujud masih menjadi titik lemah implementasi akuntansi akrual di BPKAD Kabupaten Kupang temuan yang relevan dengan konteks BKPP yang memiliki aset tidak berwujud berupa sistem informasi kepegawaian. Sementara itu, Feryansyah et al. (2025) menyoroti tantangan penyusunan CaLK berbasis SIPD-RI, di mana masih terdapat gap antara konfigurasi sistem dengan kebutuhan pengungkapan sesuai PSAP No. 04.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi berarti, terdapat kesenjangan yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada OPD penghasil pendapatan, sementara kajian pada spending unit seperti BKPP yang memiliki karakteristik transaksi unik masih sangat terbatas. Kedua, penelitian yang secara spesifik mengkaji keterkaitan antara pengungkapan CaLK dengan kinerja digitalisasi administrasi kepegawaian belum banyak dilakukan, padahal tren transformasi digital menciptakan jenis aset dan transaksi baru yang memerlukan perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang tepat. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan analisis kesesuaian formal dengan evaluasi kualitas substantif pengungkapan secara bersamaan pada konteks OPD spesifik di Kabupaten Banyuwangi belum pernah dilakukan sebelumnya. Kesenjangan tersebut menegaskan perlunya penelitian yang secara komprehensif menganalisis penerapan PSAP No. 04 pada BKPP Kabupaten Banyuwangi, khususnya terkait dua fokus utama, yaitu: (1) penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BKPP, dan (2) penyajian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam CaLK BKPP Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam CaLK BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 berdasarkan PSAP Nomor 04 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi PSAP No. 04 pada spending unit dengan karakteristik aset tidak berwujud yang semakin kompleks akibat transformasi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BKPP Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya, bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas SDM akuntansi pada OPD, serta bagi BPK dan Inspektorat Daerah sebagai referensi dalam evaluasi kualitas laporan keuangan SKPD.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara sistematis fenomena terkait penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada

BKPP Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 04. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengungkapan fakta, kondisi, dan proses penyusunan laporan keuangan yang terjadi secara langsung di lingkungan BKPP Kabupaten Banyuwangi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan, seperti bagian keuangan, bendahara, dan staf akuntansi BKPP Kabupaten Banyuwangi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), struktur organisasi, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian penyajian CaLK BKPP Kabupaten Banyuwangi dengan ketentuan PSAP No. 04 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan yang diterapkan pada instansi tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan merupakan bagian penting dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berfungsi memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan pencapaian anggaran suatu instansi pemerintah. Penyajian informasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan PSAP No. 04, CaLK memuat penjelasan naratif atas laporan keuangan agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan.

Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), ikhtisar pencapaian kinerja keuangan memuat informasi mengenai realisasi belanja, pelaksanaan program kerja, serta penggunaan anggaran dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN). Penyajian tersebut digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu periode.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian kinerja keuangan juga membantu instansi dalam mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya penyajian yang sistematis dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, kualitas laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.1 Penyajian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pembelanjaan sehingga tidak ada pendapatan nominal yang diperoleh. Input yang dihasilkan adalah berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang handal. Kegiatan belanja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Kegiatan Belanja Operasi tersedia anggaran sebesar Rp. 28.234.686.155,00 yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Akan tetapi yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 24.507.042.604,00. Berdasarkan perbandingan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan anggaran yang telah direalisasikan tersebut, diperoleh pencapaian kinerja belanja operasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar 86,80%.

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp23.676.880.035,00 dan terealisasi sebesar Rp20.348.456.059,00 atau setara dengan 85,94 persen dari total anggaran. Sisa anggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian pelaksanaan, melainkan merupakan hasil pengelolaan yang efisien, sebagaimana dikonfirmasi melalui wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan BKPP. Faktor penyebab utamanya adalah adanya beberapa posisi jabatan yang kosong sementara waktu serta penerapan pola kerja hibrida yang mengurangi kebutuhan biaya operasional rutin. Hal ini sesuai dengan temuan Feryansyah dan kawan-kawan (2025) yang menyatakan bahwa tingkat realisasi yang belum mencapai seratus persen tidak selalu mencerminkan kinerja yang buruk, melainkan dapat menunjukkan adanya penghematan yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Sementara itu, belanja barang dan jasa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp4.557.806.120,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.158.586.545,00 atau mencapai 91,24 persen. Tingkat capaian yang lebih tinggi ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan pendukung untuk transformasi digital administrasi kepegawaian. Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2024 mengingatkan bahwa realisasi belanja yang mendekati angka sempurna tetap perlu diawasi secara ketat untuk memastikan tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang kurang mendesak pada akhir periode anggaran.

Tabel 1. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
			(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI				
1.	Belanja Pegawai	23.676.880.035,00	20.348.456.059,00	85,94
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.557.806.120,00	4.158.586.545,00	91,24
JUMLAH		28.234.686.155,00	24.507.042.604,00	86,80

Kegiatan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 memiliki anggaran sebesar Rp28.234.686.155,00 dan terealisasi sebesar Rp24.507.042.604,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,80%. Belanja operasi tersebut terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp23.676.880.035,00, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan sebesar Rp21.235.591.613,00 dengan realisasi Rp18.296.312.170,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 86,16%, serta tambahan penghasilan PNS sebesar Rp2.441.288.422,00 dengan realisasi sebesar Rp2.052.143.889,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 84,06%. Sementara itu, belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp4.557.806.120,00 dan terealisasi sebesar Rp4.158.586.545,00 dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 91,24%, yang terdiri atas belanja barang dengan anggaran Rp1.389.710.650,00 dan realisasi Rp1.322.715.933,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 95,18%, serta belanja jasa dengan anggaran Rp2.787.150.470,00 dan realisasi Rp2.462.639.355,00 atau tingkat pencapaian kinerja sebesar 88,36%. Selain itu, kegiatan belanja modal memiliki anggaran sebesar Rp679.207.600,00 dengan realisasi sebesar Rp666.401.890,00 dan tingkat pencapaian kinerja sebesar 98,11%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
			(Rp)	(%)
BELANJA MODAL				
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.207.600,00	610.072.300,00	99,80
2.	Belanja Modal Barang dan Bangunan	275.000.000,00	797.646.800,00	99,71

3.2 Penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam CaLK pada BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. CaLK berfungsi memberikan penjelasan rinci mengenai informasi keuangan agar laporan dapat dipahami secara jelas oleh pengguna laporan. Sesuai dengan PSAP No. 04, CaLK memuat penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, rincian pos-pos laporan keuangan, serta informasi lain yang mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pada BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Pos-pos laporan keuangan yang diungkapkan meliputi realisasi belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta informasi terkait pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi ASN.

Penyajian laporan keuangan dalam CaLK dilakukan secara sistematis dengan memberikan penjelasan terhadap angka-angka yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan pendukung lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

3.2.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah uraian rinci mengenai setiap akun atau **pos** yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan agar pembaca dapat memahami sumber, penggunaan, serta perbedaan antara anggaran dan realisasinya. Berdasarkan hasil wawancara pada BKPP Kabupaten Banyuwangi, pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal. Belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp23.676.880.035,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.348.456.059,00 atau sebesar 85,94% dari total anggaran, di mana sisa anggaran sebesar Rp7.088.343.807,00 terjadi karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dan pengurangan kegiatan pelatihan ASN yang dilaksanakan secara daring. Belanja operasional dianggarkan sebesar Rp28.234.686.155,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.507.042.604,00 atau sebesar 86,80% dari anggaran, mengalami kenaikan sebesar Rp333.200.000 atau 9,40% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.542.400.000 yang dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan administrasi pelayanan kepegawaian berbasis digital. Adapun belanja modal dianggarkan sebesar Rp679.207.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp666.401.890,00 atau sebesar 98,11%, yang digunakan untuk pengadaan perangkat komputer, server, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung implementasi digitalisasi administrasi kepegawaian melalui aplikasi SIASN.

3.2.2 Penjelasan Atas Laporan Operasional (LO)

Penjelasan Atas Laporan Operasional (LO) adalah uraian rinci mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Operasional (LO) untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang pendapatan, beban, serta surplus atau defisit operasional selama satu periode pelaporan. Pendapatan-Laporan Operasional (LO) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun berjalan. Berdasarkan hasil dokumentasi laporan keuangan BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, realisasi beban operasional sebesar Rp 24.053.898.728,50 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 14.000.656.670,14 atau meningkat sebesar Rp 10.053.242.058,36 (71,81%). Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya program pengembangan kompetensi ASN dan peningkatan layanan administrasi digital kepegawaian.

3.2.3 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah uraian rinci mengenai perubahan nilai ekuitas suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya ekuitas, baik yang berasal dari hasil operasional maupun koreksi lainnya. Ekuitas dana Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2025 sebesar Rp. 11.390.246.251,57. Sedangkan tahun 2024 sebesar Rp. 11.346.430.426,76. dengan ini mengalami Kenaikan dari Ekuitas Dana tahun 2024 ke 2025 yaitu sebesar Rp. 43.815.824,82 atau 0,39%.

3.2.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca adalah uraian rinci mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Neraca, yang bertujuan untuk memberikan informasi lebih jelas tentang posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode pelaporan. Neraca menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki entitas. Pos-pos Neraca BKPP Kabupaten Banyuwangi terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan kewajiban jangka pendek. Aset lancar terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, persediaan barang habis pakai, dan piutang daerah, di mana per 31 Desember 2025 saldo kas bendahara pengeluaran tercatat sebesar Rp632.306.628,50 yang merupakan sisa uang

persediaan kegiatan operasional dan telah disetorkan kembali ke kas daerah pada awal Januari 2026. Aset tetap dinilai menggunakan harga perolehan (historical cost) dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.079.983.754,58 yang terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, kendaraan dinas, peralatan komputer dan mesin, serta jaringan teknologi informasi. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp78.803.784,00 yang terdiri atas aset tidak berwujud berupa aplikasi dan sistem informasi kepegawaian. Adapun kewajiban jangka pendek sebesar Rp727.074.663,00 terdiri atas utang belanja barang, utang bunga, utang pinjaman dari lembaga keuangan bank dan jasa, serta kewajiban pembayaran honorarium kegiatan yang belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. BKPP telah menyajikan informasi keuangan secara sistematis melalui pengungkapan identitas entitas, kebijakan akuntansi, serta penjelasan rinci atas pos-pos laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dari aspek kinerja keuangan, realisasi belanja operasi mencapai 86,80% dari anggaran yang tersedia, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 98,11%. Tingginya tingkat realisasi belanja modal menunjukkan komitmen BKPP dalam mendukung transformasi digital administrasi kepegawaian melalui pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Selain itu, penerapan dual basis akuntansi antara basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual pada laporan keuangan lainnya telah disajikan dengan cukup baik sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan instansi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas substantif pengungkapan masih dapat ditingkatkan, khususnya terkait penjelasan kebijakan amortisasi aset tidak berwujud, penyajian rekonsiliasi yang lebih rinci antara LRA dan LO, serta analisis tren kinerja keuangan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pengungkapan tersebut diperlukan agar informasi yang disajikan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap standar akuntansi, tetapi juga mampu memberikan nilai informatif yang lebih tinggi bagi para pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, penyajian CaLK BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 telah mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem informasi keuangan, serta pengembangan pedoman pengungkapan yang lebih komprehensif menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang.

Referensi

1. Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. 2021. [Online]. Available: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo+\(2021\)+Akuntansi+Sektor+Publik.+Edisi+Revisi.+Yogyakarta:+Andi.&ots=z6xx-t2bNG&sig=hA7ZU8bD-qpfqrrIT97hxaNodKo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pBVCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Mardiasmo+(2021)+Akuntansi+Sektor+Publik.+Edisi+Revisi.+Yogyakarta:+Andi.&ots=z6xx-t2bNG&sig=hA7ZU8bD-qpfqrrIT97hxaNodKo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
2. T. Kualitas, L. Keuangan, and S. Publik, "7126-23691-1-Pb (1)," vol. 23, no. 02, pp. 1–12, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
3. R. A. Linggupa, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Sesuai PSAP No. 01 pada Kantor Desa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado," *J. Ilm.*, vol. 5, no. 1, p. h. 1, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.prima.ac.id/index.php/equil/article/view/229/63>
4. H. P. Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, *Dan R & D*. 2024.
5. T. Rahmayani and S. Sudarmo, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) OLEH PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah di Jawa Tengah)," *Diponegoro J. Account.*, vol. 3, no. 2, pp. 1113–1121, 2014, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6175>
6. F. Feryansyah *et al.*, "Pendampingan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Berbasis SIPD RI pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Bima Abdi J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 344–355, 2025, doi: 10.53299/bajpm.v5i2.1651.
7. N. Kusmandani, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021," *Ecodunamika*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/6469%0Ahttps://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/download/6469/2173>
8. Y. Prayogo, A. S. Fikri, and K. P. Nandini, "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah," vol. 3, no. 2, pp. 44–58, 2023.
9. F. M. Reu, "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 . peristiwa lainnya," vol. 9, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.67>
10. A. Katili and M. Mahmud, "Strategi Membangun Novelty dalam Karya Tulis Ilmiah," vol. 3, no. 3, pp. 107–111, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9375>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. K. Standar and A. Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan," 2025.
12. M. Pendidikan, D. A. N. Kebudayaan, and R. Indonesia, "No Title," 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163792/permendikbud-no-40-tahun-2015>
13. Sumarsono, "APBD Banyuwangi 2025 Disahkan, Proyeksi Anggaran Tembus Rp. 3,473 Triliun." [Online]. Available: <https://rri.co.id/jember/info-parlemen/1115282/apbd-banyuwangi-2025-disahkan-proyeksi-anggaran-tembus-rp-3-473-triliun>
14. F. S. S. Priyatna Fazar Dimas, Satrio Ferry Augusta, "APBD Tahun 2025 Digodok, Plt. Bupati Banyuwangi Sampaikan Nota Keuangan Raperda." [Online]. Available: https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/516476/apbd-tahun-2025digodok-plt-bupati-banyuwangi-sampaikan-nota-keuangan-raperda?utm_source=com
15. L. J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif/penulis," *Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA PT Remaja Rosdakarya*, vol. 410, 2018, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lexy+J.+Moleong+penulis.+%282018%29.+Metodologi+penelitian+ku+alitatif+%2F+penulis%2C+Prof.+DR.+Lexy+J.+Moleong%2C+M.A.+Bandung+%3A%3A+PT+Remaja+Rosdakarya%2C.&btnG=
16. R. Indonesia, "Presiden republik indonesia," 2010.
17. E. S. heferw *et al.*, "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 04 PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS BASED ON STATEMENT OF GO," vol. 11, no. 02, pp. 494–505.
18. F. Feryansyah *et al.*, "Pendampingan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Berbasis SIPD RI pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Bima Abdi J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 344–355, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i2.1651>
19. D. Heald and R. Hodges, "The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 32, no. 5, pp. 785–795, 2020, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Heald%2C+D.+%26+Hodges%2C+R.+%282020%29.+The+accou+nting%2C+budgeting+and+fiscal+impact+of+COVID-19+on+the+United+Kingdom.+Journal+of+Public+Budgeting%2C+Accounting+%26+Financial+Management&btnG=
20. F. M. Reu, "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang," *Akubis J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 41–58, 2024, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kapantow%2C+F.+M.+%282024%29.+Evaluasi+Penerapan+Standar+Akuntansi+Pemerintah+Berbasis+AkruaL+dalam+Penyusunan+Laporan+Operasional+pada+BPKAD+Kabupaten+Kupang.+Akubis%3A+Jurnal+Akuntansi+dan+Bisnis%2C&btnG=
21. J. Christiaens, C. Vanhee, F. Manes-Rossi, N. Aversano, and P. Van Cauwenberge, "The Effect of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison," *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 81, no. 1, pp. 158–177, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/0020852314541210>
22. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019, [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=mahmudi2019mksppublic>
23. IFAC (International Federation of Accountants), "IPSAS 31 – Intangible Assets," *IPSASB Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. New York: IFAC, 2022, [Online]. Available: <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSAS-31.pdf>
24. C. Hood, "A Public Management for All Seasons?," *Public Adm.*, vol. 69, no. 1, pp. 3–19, 1991, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
25. C. Pollitt and G. Bouckaert, *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198795452.001.0001>
26. BPK RI, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024," Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024, [Online]. Available: <https://www.bpk.go.id/ihrs>
27. N. Kusmandani, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021," *Ecodunamika*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/6469>
28. Issue, Volume, Rina Zahara, Teuku Zulkarnain, Jurusan Bisnis, and Politeknik Negeri Lhokseumawe. 2025. "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai PSAP 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh." 8(1). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jutin/article/view/40315>.
29. Khasanah, Uswatun, Ayunda Putri Nilasari, Fakultas Ekonomi, and Universitas Tidar Magelang. 2023. "Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." 3(1): 279–88. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/download/381/310>.
30. Haluti, Satriani, Restiyani Andrea, and Nina Yustina Yamin. 2010. "Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali." 8(2): 137–47.
31. Prayogo, Youdhi, Atar Satria Fikri, and Khairunnisa Puti Nandini. 2023. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah." 3(2): 44–58. <https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/dinamika/article/download/380/340>.
32. Br, Dora Claudia. 2026. "Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 9 Nomor 1, 2026 | 96." 9: 96–101. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/57160/34518/205192>.